

ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA MEMASUKI ERA BONUS DEMOGRAFI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2022

Bagus Yoga Pratama

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Email : bagus1900010020@webmail.uad.ac.id

Abstrak

Bonus Demografi adalah kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun lebih banyak daripada penduduk bukan usia produktif, terdapat beberapa parameter untuk melihat apakah suatu wilayah tersebut sudah mengalami bonus demografi atau belum yaitu dengan melihat angkatan kerjanya. Banyaknya penduduk usia produktif namun tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja tentu akan menimbulkan masalah seperti pengangguran. Penelitian ini bermaksud ingin melihat pengaruh variabel investasi, jumlah industri, IPM, angkatan kerja, upah minimum, dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan, data ini merupakan data sekunder, dan model regresi yang diterapkan adalah *random effect*. Kesimpulan dari penelitian ini menetapkan terdapat tiga variabel yang berpengaruh yakni IPM, investasi, dan angkatan kerja dengan pengaruh yang positif, variabel lain yaitu jumlah industri, upah minimum dan PDRB tidak berpengaruh. Diharapkan pemerintah terus meningkatkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kata Kunci: Penyerapan tenaga kerja, investasi, jumlah industri, IPM, angkatan kerja, upah minimum, PDRB, dan bonus demografi

Pendahuluan

Di Negara Indonesia sekarang telah memasuki era bonus demografi yaitu di mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2030, masuk nya pada era tersebut akan membuka peluang untuk menikmati bonus demografi (demographic dividend) menurut (Badan Pusat Statistik, 2022). Dilihat dari hasil sensus penduduk tahun 2020 di Indonesia menunjukkan kenaikan pada usia 15-64 tahun yaitu usia produktif. Pada tahun tersebut jumlah penduduk usia produktif mencapai 70,72% dari total keseluruhan penduduk. Presentase kenaikan tersebut meningkat dari hasil sensus penduduk tahun 2010 yaitu presentase penduduk usia produktif sebesar 66%. Melonjaknya penduduk pada usia produktif akan menyebabkan berkurangnya nilai angka ketergantungan penduduk. Menurut Todaro (2011) bonus demografi di lihat dari jumlah rasio ketergantungan yaitu di bawah 50% (Maryati, 2015).

Syarat tercapainya bonus demografi yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, terserapnya sumber daya manusia tersebut ke pasar kerja, adanya tabungan rumah tangga, dan meningkatnya kontribusi perempuan dalam pasar kerja (Heri et al., 2022). Jika rasio ketergantungan rendah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sedangkan jika rasio ketergantungan tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat (Panggabean, 2020)

Masalah penyerapan tenaga kerja masih menjadi momok menakutkan bagi pemerintah dan merupakan salah satu masalah yang susah untuk di selesaikan. Hal itu terjadi karena jumlah masyarakat pada usia produktif belum mampu atau belum mendapatkan pekerjaan dan sebaliknya lapangan pekerjaan itu sendiri juga belum meningkat untuk bisa memenuhi kebutuhan para masyarakat yang termasuk angkatan kerja tersebut. Semakin banyak angkatan kerja juga akan mengakibatkan persaingan antar individu dalam mendapatkan pekerjaan, keunggulan serta keterampilan dan juga pengetahuan menjadi modal penting bagi individu tersebut untuk mendapat pekerjaan dan yang tidak bisa bersaing tidak akan mendapat pekerjaan kemudian menjadi pengangguran.

Topik ini membuat semakin menarik di bahas selain karena pemaparan di atas namun juga karena saat ini kita sudah memasuki era yang seharusnya sudah menikmati bonus demografi. Dan juga pada tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah termasuk kedalam urutan Provinsi yang jumlah penduduk nya paling banyak di Indonesia, yaitu urutan ke 3 di bawah Jawa Timur dan di atas Sumatra Utara.

Tabel 1. 1 Presentase Kenaikan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Tahun	Kenaikan Jumlah Penduduk (persen)
2019	0,32
2020	2,55
2021	0,3
2022	0,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa tengah, 2019-2022, diolah

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa di Provinsi Jawa Tengah peningkatan *total population* terjadi di setiap tahun nya. Peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sejumlah 36.516.00 jiwa meningkat menjadi 36.742.500 jiwa, dan kemudian pada tahun 2022 meningkat juga menjadi 37.032.400 jiwa. Namun peningkatan terbesar terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu pada tahun 2019 sejumlah 34.552.500 jiwa dan pada tahun 2020 menjadi 36.516.000 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk tersebut harapannya pemerintah Provinsi Jawa Tengah bias memanfaatkannya untuk dapat menghasilkan produksi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dengan cara meningkatkan kualitas penduduknya tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memikirkan penambahan lapangan pekerjaan seiring dengan

peningkatan jumlah penduduk agar tidak menjadikan masalah seperti pengangguran yang meningkat.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengembangkan faktor-faktor yang di yakini mampu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja meliputi, Investasi, Jumlah Industri, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angkatan Kerja, Upah minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sehingga judul penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah **“Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Memasuki Era Bonus Demografi di Jawa Tengah Tahun 2020-2022”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Industri terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Angkatan Kerja terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
5. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
6. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

Tujuan penelitian

1. Mengetahui pengaruh Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengetahui pengaruh Jumlah Industri terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Mengetahui pengaruh Angkatan Kerja terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengambil landasan dari teori utama mengenai ketenagakerjaan yang dikemukakan oleh Adam Smith, seorang tokoh utama dalam aliran ekonomi klasik (1729 - 1790). Smith mengajarkan bahwa pengalokasian sumber daya manusia dengan efektif adalah kunci awal dalam pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi mencapai pertumbuhan, baru kemudian akumulasi modal fisik menjadi penting untuk mempertahankan pertumbuhan tersebut. Secara

umum, tenaga kerja merujuk pada sekelompok penduduk dalam rentang usia 15-64 tahun yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam produksi barang dan jasa jika ada permintaan untuk kemampuan mereka dan jika mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Ini mencakup individu yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, serta mereka yang sedang mengejar pendidikan atau mengurus rumah tangga. Dalam prakteknya, perbedaan antara tenaga kerja dan bukan tenaga kerja biasanya ditentukan oleh rentang usia. Tenaga kerja adalah salah satu komponen kunci dalam proses produksi, dan mereka mendapatkan pendapatan melalui upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

1. Penyerapan Tenaga Kerja

Teori Keynes, yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, menyatakan bahwa tidak ada mekanisme otomatis yang akan memastikan perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut Keynes, pasar tenaga kerja tidak selalu beroperasi sesuai dengan pandangan klasik. Para pekerja sering membentuk serikat pekerja yang berusaha untuk melindungi kepentingan mereka, termasuk tingkat upah mereka. Jika tingkat upah turun, ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat dan mengurangi daya beli secara keseluruhan. Turunnya daya beli masyarakat dapat mengakibatkan penurunan harga, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi nilai produktivitas marjinal tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja merujuk pada jumlah lapangan pekerjaan yang telah diisi atau terisi oleh individu-individu yang bekerja, yang tercermin dari jumlah penduduk yang aktif bekerja (Kuncoro Haryo, 2002). Penduduk yang bekerja tersebar di berbagai sektor ekonomi karena adanya permintaan tenaga kerja. Di Indonesia, dengan populasi yang besar, kita memiliki potensi sumber daya manusia yang besar. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang melimpah ini. Tenaga kerja yang ada harus dimanfaatkan secara efektif di semua sektor ekonomi dan kegiatan. Proses penyerapan tenaga kerja ini terkait dengan keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, di mana interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja bersama-sama menentukan penggunaan tenaga kerja yang seimbang (Kadafi, 2013).

2. IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alat yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia, yang mencakup aspek fisik dan non-fisik. Aspek fisik melibatkan parameter seperti angka harapan hidup dan daya beli masyarakat, sementara aspek non-fisik berkaitan dengan kualitas pendidikan dan intelektualitas manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia menggunakan skala 0,0 hingga 100, dengan berbagai kategori yang berkaitan seperti :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) Rendah | : dibawah 50 |
| 2) Menengah Bawah | : antara 50-65,9 |
| 3) Menengah Atas | : antara 66-79,9 |
| 4) Tinggi | : lebih dari 80 |

3. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah istilah yang memiliki beberapa definisi yang berbeda. Ini mencakup jumlah tenaga kerja yang ada dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Pendekatan lain mendefinisikannya sebagai penduduk usia kerja yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Dalam konteks ini, angkatan kerja terdiri dari orang-orang yang berusia 15 tahun ke atas, baik yang sudah memiliki pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini terdiri dari pengangguran dan penduduk yang sudah bekerja. Pengangguran adalah mereka yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha atau merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka yang memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja atau sedang tidak bekerja juga termasuk dalam kelompok ini.

4. Upah Minimum

Upah adalah imbalan yang diberikan oleh pengusaha kepada karyawan sebagai hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan. Imbalan ini berupa uang dan ditentukan berdasarkan perjanjian antara pengusaha dan karyawan, yang juga tunduk pada peraturan perundang-undangan. Upah bisa mencakup tunjangan, baik untuk karyawan maupun keluarganya, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sumarsono, 2003).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 mengatur tentang upah minimum, yang mencakup upah bulanan yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah komponen upah yang diberikan setiap bulan dan tidak bergantung pada tingkat kehadiran atau pencapaian prestasi. Ada dua jenis upah minimum yang dapat dibedakan:

1. Upah Minimum Regional

Ini adalah upah pokok dan tunjangan yang berlaku untuk pekerja tingkat paling rendah yang telah bekerja kurang dari setahun di suatu wilayah tertentu.

2. Upah Minimum Sektoral

Ini adalah upah yang berlaku di suatu provinsi dan disesuaikan dengan kemampuan sektor pekerjaan tersebut.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah Upah Minimum Regional.

5. Produk Domestik Regional Bruto

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi, yang merupakan indikator untuk mengukur kemajuan ekonomi di suatu wilayah atau daerah. PDRB menggambarkan nilai akhir dari barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu

daerah selama periode tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Nurtiyas (2016). PDRB merupakan tolak ukur penting dalam analisis ekonomi regional.

PDRB juga dapat digunakan untuk menganalisis pergeseran struktur perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan PDRB menggunakan dasar harga berlaku. Selain itu, untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun, PDRB yang dihitung dengan menggunakan tahun dasar yang berbeda dapat digunakan (Indradewa & Natha, 2015). Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi PDRB diperoleh dari berbagai sektor ekonomi regional yang terbagi menjadi 9 sektor, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan jenisnya:

1. Kelompok primer : ini mencakup sektor ekonomi yang secara langsung menghasilkan barang jadi tanpa melalui proses pengolahan tambahan. Contohnya termasuk sektor pertanian dan sektor pertambangan.
2. Kelompok Sekunder : Ini adalah sektor ekonomi yang memproduksi barang yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut sebelum menjadi barang jadi. Contohnya meliputi sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, air bersih, dan sektor bangunan.
3. Kelompok Tersier : Kelompok ini terdiri dari sektor-sektor ekonomi yang berfokus pada penyediaan jasa atau pelayanan. Ini mencakup sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa lainnya.

6. Jumlah Industri

Pengertian industri dari perspektif makro menurut Hasibuan (1994) adalah semua sektor ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah dan secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu industri yang menghasilkan barang dan industri yang menghasilkan jasa. Dalam konteks mikro, pengertian industri adalah kumpulan perusahaan-perusahaan yang mampu menghasilkan barang-barang yang serupa atau saling dapat menggantikan satu sama lain (Ummah et al., 2023)

Dalam perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Pasal 1 mendefinisikan industri sebagai kegiatan ekonomi yang melibatkan pengolahan bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi menjadi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk kegiatan perancangan dan rekayasa industri.

7. Investasi

Investasi adalah tindakan mengalokasikan sumber daya dalam jangka panjang dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan (Mulyadi, 2001). Ini juga bisa dijelaskan sebagai penanaman modal atau kepemilikan sumber daya dalam jangka panjang yang diharapkan memberikan manfaat dalam beberapa periode akuntansi mendatang (Supriyono, 1987). Investasi juga bisa dianggap sebagai penempatan dana pada saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang (Halim, 2003). Menurut Puspitaningtyas dan Kurniawan (2012), investasi adalah tindakan menempatkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama periode tertentu

dengan harapan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai investasi dalam (Wirawan et al., 2022).

Investasi juga bisa diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan untuk membeli barang-barang produksi dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa. Investasi dapat terjadi di dalam negeri atau melibatkan investasi luar negeri. Ada dua jenis investasi, yaitu:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa Inggris, yang disebut sebagai domestic investment. PMDN dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Definisi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan kekayaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah istilah yang diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu "foreign investment." Definisi Penanaman Modal Asing dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. PMA merujuk pada investasi modal asing yang dilakukan secara langsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia. Hak dan kewajiban para penanam modal, khususnya penanam modal asing, telah diatur dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Metode Penelitian

Teknik penelitian yang dipilih adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dipilih karena data yang digunakan berbentuk numerik, dan dianalisis melalui metode statistik. Pendekatan penelitian ini dapat dianggap sebagai metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang telah tersedia pada situs web resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam studi ini, data diolah melalui analisis data kuantitatif dengan tujuan untuk menentukan apakah variabel independen memiliki dampak pada variabel dependen. Proses analisis ini menggunakan pendekatan Metode Regresi Data Panel.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 INV + \beta_2 JI + \beta_3 IPM + \beta_4 AK + \beta_5 UM + \beta_6 PDRB + \varepsilon$$

Dimana :

Y	= Penyerapan Tenaga Kerja
INV	= Investasi
JI	= Jumlah Industri
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
AK	= Jumlah Angkatan Kerja
UM	= Upah Minimum
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto
β_0	= Konstanta
$\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4\beta_5\beta_6$	= Koefisien regresi berganda
ε	= Variabel pengganggu
ε	= Error Term

Sebelum melakukan uji hipotesis, hal pertama yang perlu dilakukan untuk melakukan pengolahan data panel adalah dengan menentukan model terbaik yang digunakan untuk memperoleh model yang tepat dalam mengestimasi regresi data panel. Model tersebut adalah *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menerapkan model data dinamis *fixed effect model (FEM)*

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Variabel	Penyerapan Tenaga Kerja (jiwa)	Investasi (juta rupiah)	Jumlah Industri (unit)	Indeks Pembangunan Manusia (persen)
Mean	5.65329	353132.9	122.9429	72.95514
Maximum	5.997426	9424590	518	84.35
Minimum	4.78044	0	24	66.11
Srd. Dev.	.2599374	101.2331	101.2331	4.419412
Obs	105	105	105	105

Variabel	Angkatan Kerja (jiwa)	Upah Minimum (juta rupiah)	Produk Domestik Regional Bruto (juta rupiah)
Mean	544668.6	2.018074	21800000
Maximum	1075827	2.835021	153000000
Minimum	66086	1.748	6312054
Srd. Dev.	222917.7	.2020682	26000000
Obs	105	105	105

Sumber: *Output Stata, (data diolah)*

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 105 observasi yang berasal dari 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa selama periode penelitian, rata-rata penyerapan tenaga kerja, yang diukur melalui jumlah tenaga kerja yang bekerja, adalah sekitar 5.65329 persen.

Pendekatan Model FEM

Variabel	Coef.	Std. Err.	T	P > t
Penyerapan Tenaga Kerja	4.538185	.1679783	27.02	0.000
Investasi	-2.64e-10	8.58e-10	-0.31	0.759
Jumlah Industri	.0000452	.0000687	0.66	0.513
IPM	.0087972	.0026073	3.37	0.001
Angkatan Kerja	8.27e-07	5.22e-08	15.85	0.000
Upah Minimum	.0354879	.0174685	2.03	0.046
PDRB	-1.89e-09	7.27e-10	-2.60	0.012

Sumber: *Output Stata, (data diolah)*

Dari hasil regresi diatas dapat kita lihat bahwa variabel yang berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angkatan Kerja, Upah Minimum, dan Produk Domestik Regional Bruto. Dilihat dari nilai probabilitasnya, jika kurang dari 0,05 maka variabel tersebut signifikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel seperti Investasi, dan Jumlah Industri tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah tahun 2020-2022. Pendekatan model FEM di pilih setelah melalui uji chow dan juga uji hausman, dari uji chow menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang artinya memilih model FEM. Kemudian dilakukan uji Hausman, dari hasil uji tersebut probabilitasnya yaitu 0,000, artinya model yang terbaik dalam penelitian ini yaitu FEM.

Pembahasan

Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa model yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah model fixed effect. Hasil dari

pengujian model fixed effect dan uji Apriori menunjukkan bahwa investasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat disimpulkan dari nilai probabilitas sebesar 0,759 dan koefisien sebesar 4,538185.

Dalam perencanaan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan modal dalam aktivitas pembangunan berkontribusi positif terhadap pembukaan lapangan kerja secara keseluruhan. Setiap perubahan atau peningkatan dalam investasi akan berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja, sehingga setiap penambahan investasi akan mengubah jumlah tenaga kerja yang tersedia. Namun dalam penelitian ini investasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayu dan Djohan (2015).

Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Selanjutnya, terdapat hasil yang menunjukkan bahwa jumlah industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, seperti yang terindikasi oleh nilai probabilitas sebesar 0.513. Faktor ini mungkin dipengaruhi oleh wabah penyakit yang sedang terjadi pada tahun penelitian, yaitu Covid-19, yang mulai menyebar di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Menurut data dari Kementerian Kesehatan (KEMENKUKES) tahun 2021, pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia dan Pasifik, untuk menerapkan kebijakan pembatasan wilayah dan sosial yang ketat. Dampak dari kebijakan tersebut adalah gangguan besar-besaran terhadap aktivitas ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan, termasuk pada pasar tenaga kerja dan pendapatan pekerja. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tanti Siti Rochmani, Yunastiti Purwaningsih, dan Agustinus Suryantoro (2016), yang juga menyimpulkan bahwa jumlah industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ternyata memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja, berdasarkan hasil uji Apriori yang diikuti oleh probabilitas dengan nilai sebesar 0,001 dan nilai koefisien sebesar 0,0087972. Ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu indeks IPM akan berkontribusi dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 0,0087972 persen. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Maryanti, Hefrizal Handra, dan Irwan Muslim (2021), yang juga menyimpulkan bahwa variabel IPM memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Angkatan Kerja tampak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas yang sebesar 0,0000 dan nilai koefisien sebesar 8,27. Artinya, ketika jumlah angkatan kerja

meningkat sebesar satu jiwa, penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat sebesar 8,27 persen. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Uswatun Hasannah dan Dicky Amanda (2021), yang juga menyimpulkan bahwa variabel Angkatan Kerja memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Upah Minimum terlihat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang dilihat dari uji apriori dan oleh nilai probabilitas sebesar 0.046. Hal ini konsisten dengan pandangan yang disampaikan oleh Simanjuntak (1998), di mana upah dianggap sebagai beban bagi pengusaha. Semakin tinggi tingkat upah, semakin kecil porsi keuntungan yang bisa diperoleh oleh pengusaha. Dengan demikian, pengusaha cenderung merespons kenaikan tingkat upah dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja. Selain itu, kenaikan tingkat upah juga mendorong pengusaha untuk mengadopsi teknologi yang lebih canggih dan padat modal dalam proses produksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka, yang pada akhirnya dapat mengorbankan pekerja. Penemuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rudi Hartanto, Arifah Busari, dan Muhammad Awaluddin (2018),

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, yang dapat dilihat dari nilai probabilitasnya yang sebesar 0,012 dan juga dari uji apriorinya. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang umumnya menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam konteks penelitian ini, sebagian besar sektor unggulan di Provinsi Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan atau manufaktur. Sektor ini cenderung lebih mengandalkan teknologi mesin untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi mereka, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nofandillah Arumsyah Putri dan Aris Soelistyo (2018), yang juga menyimpulkan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kawasan Gerbangkertosusila pada periode tahun 2013-2016.

Penutup

Kesimpulan

Didasarkan dari hasil analisis dan pemaparan sebelumnya, peneliti memiliki kesimpulan sebagai berikut, Penyerapan tenaga kerja di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah tidak dipengaruhi oleh Investasi. Jumlah industri tak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penyerapan tenaga kerja di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Indeks Pembangunan Manusia. Penyerapan tenaga kerja di Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Angkatan Kerja, Penyerapan tenaga kerja di Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tidak dipengaruhi oleh Upah Minimum, Penyerapan tenaga kerja di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah tak dipengaruhi oleh PDRB. Dalam penelitian ini, industri unggulan

di sebagian besar Provinsi Jawa Tengah adalah industri pengolahan atau manufaktur.

Saran

Berlandaskan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas, berikut saran yang dikemukakan, Pemerintah wajib terus menaikkan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dikarenakan investasi sangat membantu peningkatan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Total industri harus dinaikkan lagi dengan cara menambah modal ataupun investasi, sehingga tercipta proyek maupun industri padat karya baru yang tentunya akan menciptakan peluang pekerjaan, dan tentunya meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah harus meningkatkan IPM/HDI seperti kualitas hidup masyarakat, pendidikan serta setandar hidup dengan cara memperluas akses pendidikan, meningkatkan akses dan layanan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi sertam membangun atau memperbarui infrastruktur dasar seperti transportasi dan air bersih , dikarenakan IPM membantu dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.